

Kontrol sosial organisasi sosial keagamaan : studi kasus Front Pembela Islam di Provinsi DKI Jakarta

Ahmad Haerurohim, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=107953&lokasi=lokal>

Abstrak

Dilatar belakangi oleh kenayalaan sosial gerakan islam garis keras muncul kembali di antara gerakan gerakan sosial yang lain, pada era refonnasi. Sepanjang sejarah di Indonesia gerakan ini telah mengalami pasang sumt, sekaligus mengindikasikan adanya kekuatan spiritual yang berasal dan nilai-nilai agama yang dikonstruksi oleh sebagian penganutnya, dan pada kondisi tertentu muncul sebagai gerakan yang radikal. Para ahli mengidentitaskan bahwa gerakan ini merupakan model keberagamaan fundamentalis, yang secara idiologis adalah salafiah radikal, mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut orang-orang terdahulu (tokoh islam zaman awal). Idiologi ini dipengaxuhi oleh pemikiran ibn Taimiyah yang menentang infiltrasi budaya lokal dalam mempraktekkan agama, dan gerakan pemurnian ajaran agama Wahabiah.

Salah satu kelompok masyarakat yang melakukan gerakan secara radikal pada pasca reformasi adalah FPI. Agenda utamanya adalah penerapan syariat Islam, melalui amar ma'ruf nahyi munkar. Di antara aksinya adalah melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan syariat, dengan upaya remoralisasi masyarakat.

Permasalahannya, ketika FPI menggunakan alasan-alasan agama untuk melakukan kontrol sosial dan di antara aksinya terdapat kekerasan, diperlukan penjelasan sosiologis yang lebih konprehensif mengenai keterkaitan antara model keberagamaan yang terdapat dalam FPI dengan kontrol sosial yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Karakteristik organisasi sosial keagamaan; Karakteristik kontrol sosial; dan kontekstualisasi dan kedua varibel tersebut.

Dengan menggunakan kerangka teori Fundamentalisme Islam dan Kontrol Sosial, serta pendekatan kualitatif diperoleh temuan-temuan:

1. Front Pembela Islam merupakan organisasi sosial keagamaan yang dipengaruhi oleh idiologi fundamentalisme Islam dengan ciri utama:
 - a. Lahir sebagai respons atas keadaan sosial dan politik terutama kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dan marjinalisasi umat Islam.
 - b. Prinsip nilai yang dipakai adalah ajaran islam, sebagai sesuatu yang berasal dari yang suci, bersifat final dan mengatur seluruh kehidupan umat manusia.
 - c. Didirikan oleh tokoh kharismatik.
 - d. Tujuan pokok yang ingin dicapai adalah menerapkan syariat Islam.
 - e. Struktur organisasi cenderung terpusat pada satu orang sebagai ketua Umum.
 - f. Cenderung menjadi organisasi yang militan dan eksklusif.
 - g. Cenderung menonjolkan simbol-simbol distintif.
2. Kontrol sosial yang dilakukan merupakan cerminan dari fundamentalisme yang terdapat dalam FPI:

- a. Merupakan kontrol sosial para elit FPI.
- b. Nilai-nilai yang diusung merupakan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh para elit dengan sikap konservatif terhadap nilai-nilai Islam masa awal, sehingga tidak ada upaya merekonstruksi nilai-nilai yang lebih kontekstual.
- c. Kontrol sosial yang dilakukan sebatas pada tataran teknis tidak sampai pada tataran rekonstruksi nilai-nilai yang disepakati oleh berbagai kelompok masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat penulis rekomendasikan sebagai kontribusi konseptual dan kebijakan:

1. Kontribusi Konseptual

Secara sosiologis, fungsi instansi agama tidak hanya sebagai kontrol sosial, akan tetapi ada beberapa fungsi lainnya. Dengan demikian organisasi sosial keagamaan fundamentalisme juga akan melakukan fungsinya yang lain. Maka kedepan, studi mengenai gerakan islam fundamentalis perlu dilakukan dengan mengkonsentrasikan pada fungsi agama yang lain.

2. Kontribusi Kebijakan

Pemerintah (eksekutif dan Legislatif) perlu melakukan regulasi kontrol sosial yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Memposisikan dan memfasilitasi masyarakat sebagai unsur dalam kontrol sosial tidak pada tataran praksis akan tetapi pada tataran nilai. Seluruh komponen dalam masyarakat yang ada bersama-sama merekonstruksi nilai-nilai dan norma-norma universal, dan mensosialisasikannya di tangan-tengah masyarakat.

Sedangkan pada tataran praksis kontrol sosial menjadi tanggung jawab pemerintah secara formal, yang mengawasi dan mengendalikan bekerjanya nilai-nilai dan norma-norma kontrol. Regulasi ini sekaligus juga dalam rangka menghilangkan penyebab munculnya fundamentalisme, sehingga akan kehilangan momen untuk bangkit.